

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

3.1 Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan kepentingan strategis daerah dan bermanfaat bagi masyarakat terdiri dari: 1) Proses pembenahan manajemen pemerintahan daerah; 2) Proses yang harus terus dipelihara; 3) Proses yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

3.1.1 Proses Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Proses pembenahan manajemen pemerintahan daerah adalah fokus perubahan yang menjadi tujuan daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, yakni:

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Proses pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah Kota Probolinggo :

- a. Perbaikan dan evaluasi tupoksi OPD sesuai dengan kewenangan dan urusan;
- b. Mengoptimalkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan organisasi secara periodik;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap keberhasilan kinerja organisasi.

2. Tatalaksana

Proses pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Tatalaksana Pemerintah Kota Probolinggo :

- a. Pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan *bussines process OPD*
- b. Penyusunan SOP sesuai dengan standard manajemen pemerintah yang baik dan efektif penerapannya pada OPD;

- c. Peningkatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien yang berkontribusi nyata pada kinerja OPD ;
 - d. Penerapan absensi berbasis teknologi informasi dan terintegrasi;
 - e. Percepatan dan optimalisasi pelaksanaan *e-government* baik dari pengelolaan pegawai, keuangan dan kinerja.
3. Peraturan Perundang - undangan
- Proses pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Probolinggo :
- a. Penyusunan aturan tentang diskresi pada pemerintah Kota Probolinggo.
4. Sumber Daya Manusia
- Proses pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Kota Probolinggo :
- a. Penetapan hasil analisis jabatan dan beban kerja, standar kompetensi jabatan serta evaluasi jabatan;
 - b. Redistribusi dan rekomposisi pegawai secara proposional dan profesional sesuai beban kerja dan kompetensinya;
 - c. Peningkatan kompetensi, kinerja dan pola manajerial aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal;
 - d. Pelaksanaan sistem e-gov pada kompetensi, kinerja dan pola karir pegawai;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan penegakan disiplin dan pemberian sanksi PNS;
 - f. Penerapan kode etik pegawai, penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja pegawai yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pegawai;
 - g. Penilaian prestasi kerja dan pemberian penghargaan pegawai secara obyektif.

5. Pengawasan

Proses pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo:

- a. Internalisasi dan optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) di semua OPD untuk menciptakan pengendalian intern yang memadai;
- b. Percepatan dan peningkatan perbaikan kinerja pengawasan sebagai *quality assurance* kinerja OPD dan Kota atas hasil audit internal dan eksternal;
- c. Pembentukan sarana konsultasi peningkatan pengelolaan pegawai, keuangan dan kinerja OPD sesuai dengan kaidah pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan
- d. Peningkatan fungsi UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi);
- e. Pembentukan *whistle blower system*;
- f. Peningkatan kelembagaan dan kompetensi APIP secara efektif dan efisien serta berbasis teknologi informasi;
- g. Penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan penguatan tim saber pungli Kota
- h. Penyusunan Perwali tentang Pedoman pengawasan;
- i. Peningkatan penerapan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- j. Peningkatan kelembagaan dan kompetensi APIP secara efektif dan efisien serta berbasis teknologi informasi yang terintegrasi (e-audit)
- k. Pembentukan tim PMPRB;

6. Akuntabilitas Kinerja

Proses pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo :

- a. Penyusunan IKU sesuai proses bisnis;
- b. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan terintegrasi;
- c. Penyusunan Perwali tentang Pedoman pelaksanaan SAKIP;
- d. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu yang baik sebagai indikator RPJMD/ Renstra dan OPD;

- e. Pemanfaatan dokumen kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
- f. Evaluasi perencanaan kegiatan OPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD ;
- g. Penerapan penilaian kinerja OPD secara komprehensif;
- h. Peningkatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas kinerja;
- i. Pemanfaatan dokumen kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
- j. Peningkatan koordinasi antar OPD yang membidangi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan;
- k. Penyediaan E-LPPD yang terintegrasi.

7. Pelayanan Publik

Proses pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pelayanan publik Pemerintah Kota Probolinggo:

- a. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada seluruh OPD;
- b. Pengembangan sistem pengaduan layanan publik yang terintegrasi;
- c. Penyusunan regulasi tentang pengelolaan aplikasi pelayanan publik;
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- e. Peningkatan Kapasitas SDM penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan yang telah dibuat;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Standar pelayanan publik (SPP).

8. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Proses pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pola pikir dan budaya kerja birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo:

- a. Penyusunan peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara komprehensif;
- b. Penerapan budaya kerja berbasis kinerja mengutamakan *output*

- dan *outcome* yang terukur dan nyata;
- c. Internalisasi pola pikir dan budaya kerja organisasi dari pimpinan ke seluruh pegawai;
 - d. Peningkatan Inovasi dan menumbuhkan agen perubahan pada OPD.

3.1.2 Proses yang Harus Terus Dipelihara

Proses yang harus terus dipelihara merupakan keberhasilan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang harus terus dipelihara dan dipertahankan. Berikut uraian proses yang harus terus dipelihara :

1. Pemerintahan bersih dan bebas KKN
Mewujudkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Kualitas pelayanan publik
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit pelayanan publik dari tahun 2017 sebesar 79,30 (dengan kategori baik);
 - b. Mempertahankan prosentase unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan dan berupaya meningkatkan;
 - c. Mempertahankan kegiatan pemeringkatan pelayanan publik sebagai stimulus inovasi pelayanan publik.
3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja
 - a. Meningkatkan pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan dokumen kinerja pada perangkat daerah;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan aplikasi rencana anggaran, keuangan dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3.1.3 Proses yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Proses peningkatan kualitas pelayanan ini yakni pelayanan sektor - sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Jenis pelayanan ini merupakan prioritas daerah.

Proses peningkatan kualitas pelayanan sebagai prioritas daerah meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

1. Pelayanan bidang kesehatan

Prioritas perubahan dalam pelayanan kesehatan adalah peningkatan kualitas dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat.

2. Pelayanan bidang pendidikan

Prioritas perubahan dalam pelayanan pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan dengan kemudahan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

3. Pelayanan bidang perizinan

Prioritas perubahan dalam pelayanan perizinan meliputi :

- a. Penyederhaan prosedur pelayanan perizinan;
- b. Peningkatan pelayanan perizinan dengan peningkatan koordinasi secara online:

4. Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Prioritas perubahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan kependudukan 3 in 1 kelahiran dan kematian;
- b. Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Pemanfaatan data kependudukan untuk program lintas sektor.

3.2 Sasaran

Sasaran reformasi birokrasi Kota Probolinggo secara umum sama dengan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 adalah 1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sedangkan sasaran perubahan yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan terkait dengan permasalahan dalam masing-masing bidang area dan jenis pelayanan yang menjadi prioritas sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo

No.	Area Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
A.	Area Perubahan	
1.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tugas serta dinamis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Optimalisasi kebijakan dan pelaksanaan serta pelimpahan kewenangan urusan pemerintah daerah
2.	Tatalaksana	Penataan, penyempurnaan dan perbaikan tatalaksana pemerintah dan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Peningkatan dan pemenuhan manajemen kelembagaan yang modern sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i> Pengelolaan kelembagaan dengan sistem prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur

3.	Peraturan Perundang-undangan	Penguatan kebijakan kepala daerah dalam pengelolaan dan pelimpahan kewenangan urusan pemerintah daerah
		Penataan sistem administrasi, dokumentasi, evaluasi dan sosialisasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan teknologi informasi yang terintegrasi
4.	Sumber Daya Manusia	Peningkatan kebijakan dan pengelolaan sistem manajemen ASN yang profesional, transparan dan berintegritas
		Peningkatan kompetensi, kualitas, disiplin dan kesejahteraan ASN
5.	Pengawasan	Peningkatan Kapasitas, kapabilitas dan integritas lembaga pengawasan intern pemerintah daerah
		Implementasi pelaksanaan pengawasan dengan teknologi informasi yang terintegrasi
6.	Akuntabilitas kinerja	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan perangkat daerah
7.	Pelayanan Publik	Pemenuhan pedoman, prosedur dan standard pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan
		Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik pemerintah dan perangkat daerah
8.	Pola Pikir dan budaya kerja	Penguatan internalisasi dan regulasi budaya dan pola pikir kinerja pada pemerintah dan perangkat daerah
		Peningkatan inovasi dan kuantitas agen perubahan pada perangkat daerah

No.	Area Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
B.	Hal-hal yang Dipertahankan dan Ditingkatkan	
1.	Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam pengelolaan keuangan daerah
2.	Kualitas pelayanan publik	<p>Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit pelayanan publik sebesar 79,30 (baik) ditingkatkan menjadi lebih dari 85,00 (sangat baik)</p> <p>Semua unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan dan adanya peningkatan pelayanan.</p> <p>Kegiatan gelar inovasi pelayanan publik dan peningkatan inovasi pelayanan publik.</p>
3.	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja	<p>Pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan dokumen kinerja pada perangkat daerah dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p> <p>Meningkatkan aplikasi penyusunan rencana anggaran, keuangan dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>
No.	Area Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
C.	Pelayanan Publik	
1.	Pelayanan bidang kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan, standarisasi pelayanan serta jaminan kesehatan masyarakat
2.	Pelayanan bidang pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan dengan kemudahan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

3.	Pelayanan bidang perizinan	Penyederhanaan proses perizinan.
		Peningkatan pelayanan perizinan dengan peningkatan koordinasi secara online
4.	Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan akses pelayanan kependudukan dokumen kelahiran dan kematian
		Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
		Pemanfaatan data kependudukan untuk program lintas sektor
No.	Area Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
D.	Quick Wins	
1.	Bidang Kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan, yakni: SIMPUSTRONIK adalah sistem pelayanan informasi pelayanan puskesmas di wilayah Kota untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat kota dalam akses kesehatan di tingkat wilayah domisilinya.
2.	Bidang Pendidikan	Meningkatkan layanan pendidikan, yakni dengan DISCHOTIK (Digitalisasi Penilaian, Pembelajaran dan Presensi) merupakan Sistem Informasi dan monitoring pendidik serta peserta didik di sekolah yang berbasis teknologi informasi
3.	Bidang Perizinan Usaha	Meningkatkan proses pelayanan dan transparansi serta mendorong inventasi, yakni Program SIPADU yakni percepatan pelayanan proses perizinan secara online dan terpadu

4.	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan sinergisitas percepatan dokumen kependudukan, dengan : a. Program 3 in 1 yakni percepatan dan sinergisitas dokumen kependudukan masyarakat dari KTP/ KIA, Akta dan Kartu Keluarga; b. Program satu data kependudukan (NIK) untuk pelayanan kesehatan, sosial dan verifikasi program-program bantuan dari Pemerintah Kota Probolinggo.
----	---	---

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Probolinggo dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Berikut tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Probolinggo :

1. Tahun 2018

Tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten sesuai dengan target yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. menyusun tim reformasi birokrasi Kota Probolinggo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun rancangan *road map* reformasi birokrasi Kota Probolinggo;
- c. mengajukan konsultasi dan usulan RB kepada Pemerintah Provinsi;
- d. mencanangkan pelaksanaan RB Kota Probolinggo;
- e. melaksanakan sosialisasi RB kepada semua OPD hingga personilnya;
- f. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
- g. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di OPD.

2. Tahun 2019

Tahun kedua pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2018, menjaga/ memelihara program/ kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun pertama. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. melanjutkan sosialisasi;
- b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di OPD ;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/ risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

3. Tahun 2020

Tahun ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun kedua, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun kedua. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. melanjutkan sosialisasi;
- b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi OPD ;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

4. Tahun 2021

Tahun keempat pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun ketiga,

menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. melanjutkan sosialisasi;
- b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi OPD ;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

5. Tahun 2022

Tahun kelima pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi OPD ;
- b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
- c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. melakukan evaluasi menyeluruh hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo untuk periode 2018 – 2022 dilakukan sesuai klasifikasi dalam program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, dan kriteria dalam komponen model Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015).

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan

Pelaksanaan program ini untuk mendorong dan mengarah pada sasaran perubahan dalam penataan dan penguatan organisasi serta tatalaksana pemerintah kota probolinggo, kegiatan di antaranya :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pematapan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah;
- b. Penyesuain struktur organisasi perangkat daerah (*resizing dan reorganizing*);
- c. Pendampingan dan pematapan standard prosedur kerja, tatalaksana kelembagaan perangkat daerah;
- d. Pengadaan dan peningkatan sarana serta prasarana manajemen pengelolaan kelembagaan modern dengan prinsip-prinsip *good governance* dan berbasis teknologi informasi terintegrasi.

2. Program penataan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk mendorong dan mengarah pada sasaran area perubahan pada peraturan perundang-undangan Pemerintah Kota Probolinggo :

- a. Kegiatan pengembangan budaya hukum dan kesadaran hukum;
- b. Penataan peraturan perundang-undangan;
- c. Peningkatan bantuan dan pendampingan hukum;
- d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sosialisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia Pemerintah Kota Probolinggo :

- a. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- b. Peningkatan disiplin Aparatur;
- c. Penataan dan pengembangan kompetensi aparatur;
- d. Peningkatan kesejahteraan Aparatur;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan, peningkatan dan

pengembangan Aparatur yang terintegrasi

4. Program peningkatan pengawasan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan mendorong pengawasan pada pemerintah kota probolinggo dengan kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas inspektorat kota probolinggo;
- b. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH;
- c. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas;
- d. Pendampingan dan pematapan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

5. Program perencanaan dan pematapan pembangunan daerah

Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan koordinasi, monitoring dan pengendalian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
- b. Peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah;
- c. Pengendalian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah;
- e. Peningkatan dan pengembangan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan wilayah strategis daerah yang berkelanjutan dan terintegrasi sesuai kebijakan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan;

6. Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik

Pelaksanaan program dilaksanakan untuk mendorong perubahan-perubahan pada pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan publik antara lain :

- a. Kegiatan gelar inovasi pemerintah kota probolinggo;
- b. Pengendalian, monitoring dan penilaian pelaksanaan pelayanan publik perangkat daerah;
- c. Penyusunan regulasi, internalisasi dan implementasi gerakan revolusi mental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.4 Pengorganisasian

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kota Probolinggo dilakukan dalam bentuk tim atau kepanitian sebagai berikut :

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah mempunyai tugas :

- a. Mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan terhadap konsep dan penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo.

Tim pengarah diketuai oleh Walikota dan Wakil Walikota. Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum sebagai Sekretaris.

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi pada satuan/ unit kerja perangkat daerah Kota Probolinggo;
- d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo;
- f. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Walikota.

Sekretaris Daerah sebagai Ketua I, Asisten Administrasi Umum Setda sebagai Ketua II, Kepala Bagian Organisasi Setda sebagai Sekretaris, dan semua kepala OPD sebagai Anggota.

4. Tim Monitoring dan Evaluasi

Tim Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Probolinggo;
- b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Probolinggo;
- c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Walikota.

Inspektur Inspektorat sebagai Ketua, Sekretaris Inspektorat sebagai Sekretaris, dan semua Inspektur Pembantu Wilayah sebagai Anggota.

3.5 Rencana Aksi

Rencana aksi berisi uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan proses atau fokus perubahan, permasalahan, aksi, hasil, kondisi yang diharapkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi, target pencapaian aksi diwujudkan serta program dan rencana anggaran yang diperlukan.

Rencana aksi Reformasi Birokrasi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2 Matrik Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2018-2022

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran (Rp.)/Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penataan dan Penguatan Organisasi											
Masih ada sub urusan yang dilaksanakan oleh OPD yang tidak berwenang untuk menangani urusan tersebut	Penataan dan pelaksanaan revisi tugas dan fungsi pada OPD sesuai dengan urusan dan kewenangan	Penerbitan Perwali untuk tugas dan fungsi OPD	Tugas dan fungsi sesuai dengan urusan dan kewenangannya	25%	35%	60%	80%	100%	Program peningkatan kapasitas kelembagaan	150.000.000,-	Bag. Organisasi Setda
Masih ada OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tidak tepat sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas dan fungsi	Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada OPD melalui monitoring	Dokumen hasil monitoring tugas dan fungsi	Tugas dan fungsi OPD dapat dilaksanakan sesuai urusan dan kewenangannya	25%	35%	60%	80%	100%		150.000.000,-	Bag. Organisasi Setda
Belum optimal pelaksanaan pelimpahan kewenangan	Reviu atas peraturan terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan	Dokumen hasil reviu peraturan atas pelimpahan kewenangan	Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan	35%	50%	85%	100%	100%		70.000.000,-	Bag. Pemerintahan Setda
Belum dilakukan evaluasi dan analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif dan dinamis terhadap perubahan	Pelaksanaan evaluasi dan analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif dan dinamis terhadap perubahan strategis	Dokumen evaluasi SOTK yang adaptif dan dinamis terhadap perubahan strategis	SOTK yang adaptif dan dinamis terhadap perubahan strategis	35%	45%	60%	85%	100%		50.000.000,-	Bag. Organisasi Setda

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran /Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tatalaksana											
belum dilaksanakan evaluasi terhadap penyusunan tatalaksana (<i>business process</i>)	penyusunan evaluasi tatalaksana	Dokumen evaluasi tatalaksanan	Seluruh OPD telah menerapkan tata laksana	35%	50%	100%	100%	100%	Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,-	Bag. Organisasi Setda
Belum optimal pelaksanaan SOP perangkat daerah	Penyusunan SOP sesuai dengan standard manajemen pemerintah yang baik dan efektif penerapannya pada OPD	Dokumen evaluasi SOP	Seluruh OPD telah menerapkan SOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	35%	50%	100%	100%	100%		100.000.000,-	Bag. Organisasi Setda
Penggunaan sarana dan prasarana kerja yang belum efektif dan efisien	Peningkatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien yang berkontribusi nyata pada kinerja OPD	Dokumen Monev Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kinerja organisasi	0%	35%	65%	85%	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.000.000,-	Bag. Organisasi Setda BPPKAD
belum dilaksanakan absensi eletronik yang terintegrasi	Integrasi absensi eletronik	Dokumen dan laporan absensi	Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien	0%	35%	65%	85%	100%	Program peningkatan disiplin aparatur	100.000.000,-	Diskominfo, BKPSDM
belum optimal pelaksanaan e-government	Percepatan dan optimalisasi pelaksanaan e-government baik dari pengelolaan pegawai, keuangan dan kinerja	Integrasi sistem pengelolaan pegawai, keuangan dan kinerja	Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien	0%	30%	50%	85%	100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	50.000.000,-	BAPPEDA BPPKAD Diskominfo

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran /Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peraturan Perundang-undangan											
Belum optimal penggunaan kewenangan diskresi	Penyusunan aturan tentang diskresi pada pemerintah Kota Probolinggo	Regulasi diskresi pimpinan pemerintah kota	Kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan	0%	35%	65%	85%	100%	Program penataan peraturan perundang-undangan	50.000.000,-	Bag. Hukum Setda
Sumber Daya Manusia Aparatur											
Belum tersedianya pedoman standar kompetensi jabatan	Penetapan hasil analisis jabatan dan beban kerja, standar kompetensi jabatan serta evaluasi jabatan	Dokumen dan laporan ABK, Evjab dan standar kompetensi jabatan	Penempatan pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan profesional	50%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	200.000.000,-	BKPSDM
Penempatan pegawai belum sesuai kompetensi dan kualifikasi	Redistribusi dan rekomposisi pegawai secara proposional dan profesional sesuai beban kerja dan kompetensinya										
Jumlah pegawai yang tidak proposional dan profesional	Peningkatan kompetensi, kinerja dan pola manajerial aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal										
Belum adanya pedoman yang mengatur tentang analisis beban kerja JFU dan JFT	Pelaksanaan sistem e-gov pada kompetensi, kinerja dan pola karir pegawai										

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran /Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penegakan dan pembinaan disiplin pegawai oleh atasan langsung belum optimal	Pelaksanaan Pembinaan penegakan disiplin dan pemberian sanksi PNS	Laporan pembinaan disiplin	Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000,-	BKPSDM
Pengukuran kinerja pegawai yang belum optimal	Penerapan kode etik pegawai, penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja pegawai yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pegawai	Dokumen kode etik	Peningkatan kesejahteraan aparatur	50%	50%	75%	100%	100%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	500.000.000,-	BKPSDM
Belum memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta		Dokumen talent pool	Profesionalisme aparatur								
Belum adanya regulasi tentang pendampingan kepada PNS dari tindakan penyalahgunaan wewenang		Jaminan kepastian hukum kepada pegawai	Adanya pendampingan dan jaminan hukum bagi pegawai atas kinerja dan jabatannya								
Belum optimalnya sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh PNS	Penilaian prestasi kerja dan pemberian penghargaan pegawai secara obyektif	Dokumen SKP	Optimalisasi sistem informasi yang terintegrasi	50%	50%	75%	100%	100%		500.000.000,-	BKPSDM

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran /Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengawasan											
Pelaksanaan Satgas SPIP belum optimal	Sosialisasi dan Monev Implementasi SPIP	Dokumen sosialisasi dan monev Implementasi SPIP	Tingkat Maturitas Implementasi SPIP mencapai level 3 (terdefinisi)	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	Program good governance	45.000.000,-	Inspektorat
Belum tersedianya informasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan	Pembentukan Tim PMPRB yang melibatkan OPD yang menangani 8 area perubahan	Dokumen PMPRB	Tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori A (Memuaskan)	IRB 70	IRB 73	IRB 76	IRB 79	IRB 82		50.000.000,-	
SDM APIP belum memiliki kompetensi yang memadai	Pelaksanaan bimtek dan diklat	Sertifikasi SDM APIP	Peningkatan kompetensi APIP dalam pengawasan dan pembinaan	10 Orang	15 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang		350.000.000,-	
Belum optimalnya fungsi Unit Pengendali gratifikasi (UPG) dan tim saber pungli	Peningkatan fungsi UPG dan penguatan kelembagaan tim saber pungli serta dilaksanakannya monev kegiatan	Sosialisasi Perwali Pedoman pengendalian gratifikasi serta penguatan UPG dan tim saber pungli serta adanya monev	Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari gratifikasi dan pungli	39 OPD Dan masyarakat	39 OPD Dan masyarakat	39 OPD Dan masyarakat	39 OPD Dan masyarakat	39 OPD Dan masyarakat		460.000.000,-	
Belum adanya layanan konsultasi akuntabilitas pengelolaan pegawai, keuangan dan kinerja	Pembentukan klinik layanan konsultasi akuntabilitas keuangan dan kinerja	Terbentuk dan terlembaganya layanan konsultasi akuntabilitas	Pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih dengan kinerja baik	50%	75%	100%	100%	100%		50.000.000,-	

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran /Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belum seluruh OPD ditetapkan sebagai satker zona integritas untuk mendukung WBK/ WBBM dan tercapainya IPK	Pendampingan Pembangunan ZI pada OPD dan pelaksanaan survei IPK	Penerapan ZI untuk WBK dan WBBM pada seluruh OPD serta tercapainya nilai IPK baik	Seluruh OPD mendapat nilai IPK yang baik dan telah membangun ZI menuju WBK/WBBM	3 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	39 OPD	Program good governance	60.000.000,-	Inspektorat
Belum optimalnya penerapan kendali mutu pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai	Pengembangan aplikasi e-audit yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke tahap tindak lanjut pengawasan	Pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi informasi	Akurasi data dan objektivitas hasil pengawasan lebih terjamin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		125.000.000,-	
Belum diimplementasikan pedoman dan movev pengawasan	Implementasi pedoman dan monev pengawasan	Pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman dan dokumen monev	Pengawasan dan pembinaan yang konstruktif dan sesuai kaidah baku	100%	100%	100%	100%	100%		50.000.000,-	
Belum dibentuk tim PMPRB Kota dan penilaian RB	Pembentukan tim dan penilaian PMPRB	Perwali dan hasil penilaian RB kota	Implementasi pelaksanaan RB dan penilaian hasil RB yang baik	10%	25%	65%	85%	100%		100.000.000,-	
Akuntabilitas Kinerja											
IKU belum sesuai dengan SOTK baru	Menyusun dan evaluasi IKU dan IKI sesuai SOTK baru	Perwali dan dokumen evaluasi IKU serta IKI	IKU pada SOTK baru mendukung dan sesuai kebijakan dan perencanaan kota	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah	100.000.000,-	Bag. Organisasi Setda

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran /Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belum ada reuiu atas pedoman evaluasi internal SAKIP	Pelaksanaan evaluasi dan reuiu pedoman evaluasi internal SAKIP	Pedoman dan dokumen evaluasi internal SAKIP yang akuntable	Penilaian SAKIP kota yang baik	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	Program peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH	150.000.000,-	Inspektorat
Belum tersedianya LPPD berbasis teknologi informasi	Penyediaan E-LPPD yang terintegrasi.	Aplikasi LPPD	Akuntabilitas LPPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	Program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah	50.000.000,-	Bag. Pemerintahan
Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set)											
Belum optimal pelaksanaan budaya kerja di seluruh OPD	- Workshop dan pembentukan unit/agen perubahan mind set dan culture set pada seluruh OPD - Pembentukan kelembagaan agen	Laporan workshop dan kelembagaan agen perubahan pada seluruh OPD	Peningkatan dan perubahan mind dan culture set pegawai seluruh OPD pada tujuan kinerja dan pelayanan prima	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah	150.000.000,-	di seluruh OPD
Belum ada perwali dan penetapan agen perubahan pada seluruh OPD	Penyusunan perwali dan penetapan agen perubahan	Perwali dan kelembagaan agen perubahan OPD	Peningkatan dan perubahan pola serta kinerja pada tujuan pelayanan prima	-	100%	100%	100%	100%		75.000.000,-	Bag. Organisasi Setda

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran /Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelayanan Publik											
Belum semua unit pelayanan publik memiliki sertifikat ISO	Pelaksanaan Sertifikasi ISO pada unit pelayanan	Sertifikat ISO pada unit pelayanan	Peningkatan dan standarisasi pelayanan sesuai ISO	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,-	Bag. Organisasi Setda Unit Pelayanan
Belum terintegrasinya sistem informasi perizinan pada unit pelayanan publik	Pengembangan dan penyempurnaan sarana dan prasarana sistem informasi perizinan	Sistem informasi perizinan yang efektif dan efisien	Terintegrasinya sistem informasi perizinan dan dapat dimanfaatkan oleh publik	-	100%	-	-	-		100.000.000,-	DPMPTSP Diskominfo
Belum ada perwali penyusunan standard pelayanan yang telah disusun OPD dan pelaksanaan SPP pada kecamatan serta kelurahan belum optimal	Penyusunan perwali dan dokumen standard pelayanan publik serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hingga tingkat kelurahan	- Perwali SPP dan SKM - Pedoman dan dokumen SPP dan SKM	Pelaksanaan SPP dan SKM sesuai pedoman dan standard baku	50%	75%	100%	-	-		200.000.000,-	Bag. Organisasi Setda Bag. Pemerintahan Setda
Belum seluruh OPD melakukan survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survei dan monev SPP serta SKM	Dokumen SPP dan SKM serta laporan monev	Seluruh OPD telah melaksanakan SKM dan adanya peningkatan pelayanan	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,-	Bag. Organisasi Setda
Sarana dan prasarana pelayanan serta media kontrol masyarakat pada unit pelayanan belum optimal	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pelayanan hingga tingkat kelurahan	Sarana dan prasarana pelayanan yang efektif dan efisien melayani masyarakat	Peningkatan kinerja pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%		500.000.000,-	Diskominfo

Pemasalahan	Aksi	Hasil	Kondisi yang Diharapkan	Target Pencapaian Aksi					Program	Estimasi Anggaran /Tahun	Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelayanan Publik											
Belum tersosialisasikan layanan publik secara optimal	Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi layanan publik secara periodik	Laporan dan kegiatan sosialisasi dan publikasi layanan publik	Pemahaman dan pemanfaatan layanan publik yang optimal oleh	-	100%	-	100%	-	Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,-	Diskominfo
Belum ada perwali road map, SPP perizinan dan monev investasi kota	Penyusunan ketentuan peraturan SPP perizinan, road map invenstasi dan monev	Perwali SPP perizinan, road map investasi dan dokumen monev	Adanya payung hukum pelaksanaan dan peningkatan investasi kota	100%	100%	100%	100%	100%		100.000.000,-	DPMPPTSP
Belum optimal kegiatan promosi investasi daerah	Peningkatan kegiatan promosi investasi daerah	- Pameran dan publikasi investasi daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas investasi di Kota	100%	100%	100%	100%	100%		250.000.000,-	DPMPPTSP

